

**KINERJA BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN PEKON**

(Studi di Pekon pampangan Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

MIRZI PAHLOVI

NPM: 1831040224



Program Studi Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023M**

**KINERJA BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN PEKON**

(Studi di Pekon pampangan Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh:

**MIRZI PAHLOVI
NPM: 1831040224**

**Pembimbing I : Drs. Agustamsyah, M.I.P
Pembimbing II: GesitYudha, M.I.P**

Program Studi Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
1444H / 2023M**

ABSTRAK

KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON

(Studi di Pekon pampangan Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)

Oleh:

Mirzi Pahlovi

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Dalam urusan kepanitian Musyawarah Pekon Pampangan dipimpin oleh kepala pekon, serta dibantu oleh anggota BHP dan aparatur pekon, keanggotaan panitia musyawarah bersifat sukarela namun dalam kenyataannya perencanaan pembangunan pekon relatif belum dilaksanakan secara terpadu prosedur dan tata cara penyelenggaraan pembangunan musyawarah pekon tidak menganut prinsip musyawarah mufakat, kepala pekon cenderung mengabaikan keinginan masyarakat dalam kata lain segala keputusan ada pada tangan kepala pekon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon serta untuk mengetahui koordinasi Badan HIPPUN Pemekonan dengan kepala pekon dalam mewujudkan realisasi pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan metode berfikir deduktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

Pelaksanaan kinerja Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pihak BHP dalam setiap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selalu dilakukan dengan mengadakan musyawarah, masyarakat selalu dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi BHP juga berperan aktif dalam musyawarah tersebut, setelah melakukan setiap kegiatan mereka melakukan evaluasi mengenai kegiatan yang telah

berlangsung baik itu dalam kegiatan yang bersifat pembangunan maupun yang lainnya yang berasal dari aspirasi masyarakat. Bentuk koordinasi kerjasama dalam perencanaan pembangunan di Pekon Pampangan bersifat horizontal dalam arti kebersamaan, kesejajaran, dan kemitraan. Masyarakat Pekon Pampangan menyalurkan aspirasi kepada BHP, kemudian disampaikan kepada Kepala Pekon untuk pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon diajukan oleh Kepala Pekon yang kemudian dimusyawarahkan bersama BHP dengan pertimbangan atau evaluasi APB tahun sebelumnya. Bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pekon dengan pihak BHP dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan pekon. Secara konseptual, keterkaitan antara Kepala Pekon dan BHP lebih pada *check and balance* yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol diantara lembaga pekon demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Serta bentuk komunikasi antara BHP dengan Pemerintah Pekon bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di pekon baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak pekon itu sendiri.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Badan HIPPUN Pemukiman, Kinerja, Koordinasi

ABSTRACT

PERFORMANCE OF HIPGUN PEMEKONAN AGENCY (BHP) IN DISTRIBUTING THE COMMUNITY'S ASPIRATIONS TOWARDS PEKON DEVELOPMENT

(Study in Pampangan Village, Cukuh Balak District,
Tanggamus Regency)

By:

Mirzi Pahlovi

Hippun Pemekokan Agency (BHP) has the task of channeling the aspirations of the community. In terms of committee matters the Pampangan Village Deliberation is chaired by the Village Head, and is assisted by members of the BHP and village apparatus, membership of the deliberation committee is voluntary but in reality village development planning has relatively not been carried out in an integrated manner. The village head tends to ignore the wishes of the community, in other words, all decisions are in the hands of the Village Head.

This study aims to determine the performance of the Pemekonan Hippun Board in channeling the aspirations of the community towards village development and to find out the coordination between the Village Government and Village Heads in realizing the realization of development. This type of research is field research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. To analyze the data uses deductive thinking method, namely thinking by departing from concrete facts or events from facts or events that are specifically generalized so that they have a general nature.

The performance of the Hippun Pemekonan Board of Pekon Pampangan, Cukuh Balak District in channeling the aspirations of the community is quite good, this can be seen from the BHP in accommodating and channeling the aspirations of the community it is always done by holding deliberation, the community is always involved in conveying the aspirations of BHP also plays an active role in deliberation After carrying out each activity, they evaluate the

activities that have taken place, both in development activities and other activities that originate from community aspirations. The form of coordination of cooperation in development planning in Pekon Pampangan is horizontal in the sense of togetherness, alignment, and partnership. The Pampangan Village community submits their aspirations to BHP, which is then submitted to the Village Head for the drafting of the Village Revenue and Expenditure Budget submitted by the Village Head which is then discussed with BHP with consideration or evaluation of the previous year's APB. The form of unity of action taken by the village government with the BHP in the process of discussing and drafting village regulations. Conceptually, the relationship between the Village Head and BHP is more of a check and balance which in essence is a mechanism of mutual control between village institutions in order to avoid the occurrence of power deviations in the context of community welfare, and the form of communication between BHP and the Village Government can be seen in the implementation of existing programs in the Village, both programs from the government or programs that are the rights of the Villages themselves

Keywords: Regional Regulation of Tanggamus Regency regarding the HIPPUN PEMEKONAN AGENCY, PERFORMANCE, COORDINATION

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirzi Pahlovi
NPM : 1831040224
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN** (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023
Peneliti



Mirzi Pahlovi
1831040224



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721)780887

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

Nama : Mirzi Pahlovi

NPM : 1831040224

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddindan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Drs. Agustamsyah, M.I.P
NIP.196001041994031003**

Pembimbing II

Gesit Yudha, M.I.P

Mengetahui, Ketua Jurusan

**Abd. Oohar, M.Si
NIP.19710312200501005**



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp: (0721)780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN Pekon (Studi Di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).** Di susun oleh : **Mirzi Pahlovi, NPM :1831040224.** Program studi : **Pemikiran Politik Islam,** telah di ujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama pada Hari/Tanggal ; **Kamis 16 Maret 2023.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr Suhandi M.Ag

Sekretaris : Dwi Rosmawati,S.Tr.Keb.,M.Kes

Penguji utama : Abd. Qohar, M.Si

Penguji pendamping I : Drs.Agustamsyah, M.I.P

Penguji pendamping II : Gesit Yudha, M.I.P



MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

"Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik,
melainkan balasan yang baik juga?"

AR-RAHMAAN 55:60





PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Roziqul Qorib, dan Ibu Anaisna Dewi yang telah sangat berjasa selama masa hidupku yang selalu memberikan do'a, dukungan dan bantuan serta kasih sayang yang tidak ada batasnya di setiap perjalanan hidup peneliti selama menuntut ilmu.
2. Teruntuk abang dan adik kandung ku Gustama Peryanda, Naufal Qorbi dan Elisa Selfia yang sudah memberikan semangat, semoga bisa lebih baik di kemudian hari dari peneliti.
3. Teruntuk Almamaterku Tercinta UIN Raden Intan Lampung





RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Mirzi Pahlovi lahir pada tanggal 30 November 1999 di Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, peneliti merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari anak Bapak Roziqul Qorib dan Ibu Anaisna Dewi, peneliti mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Pampangan pada Tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Cukuh Balak pada Tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Cukuh Balak pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam. Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka peneliti menyusun Skripsi yang berjudul **“Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon.”** Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Pampang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana sosial dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam ruang lingkup pertemanan maupun Universitas. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd. Qohar, M. SI. selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
4. Bapak Drs. Effendi, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam bidang akademik selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku pembimbing I dan Bapak Gesit Yudha, M.I.P selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Bapak Kepala Pekon Pampangan dan Badan Hippun Pemekonan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing dan mendidik hingga saya bisa mencapai pada titik ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku Aldiyansah, Riza Rivaldo, Rohimansyah, Ahmad Fajar.
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat perjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2018 Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah banyak memberikan pengalaman, saran, kebahagiaan, doa, dan dukungan serta motivasi terhadap peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
11. Terimakasih kepada kader-kader HMI yang telah memberikan pengalaman luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga yang lainnya terkhusus pada program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Maret 2023
Peneliti

Mirzi Pahlovi
1831040224

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Penelitian	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	18
I. Kerangka Teoritik	23
J. Sistematika Pembahasan	25

BAB II. KINERJA, BHP, ASPIRASI MASYARAKAT, PEMBANGUNAN

A. Kinerja	27
1. Pengertian Kinerja	27
2. Indikator Kinerja	29
3. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja ..	30
B. Tinjauan Pemerintahan Pekon	32
1. Pemerintahan Pekon	32
2. Kepala Pekon	34
3. Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)	35

C. Aspirasi Masyarakat	37
1. Pengertian Aspirasi	37
2. Pengertian Masyarakat	37
3. Pengertian Aspirasi Masyarakat	38
4. Tingkat Aspirasi Masyarakat	40
D. Pembangunan	43
1. Pengertian Pembangunan	43
2. Pengertian Pekon	45
3. Pengertian Pembangunan Pekon	46

BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan HIPPUN Pemekonan	49
B. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	50
C. Lokasi Penelitian	62
D. Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Pampangan	62

BAB IV. KINERJA BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON

A. Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon	67
B. Koordinasi Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dengan Kepala Pekon dalam Mewujudkan Realisasi Pembangunan pada Tahun 2021	90

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	104

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam karya ilmiah, judul merupakan sebuah bagian yang penting, karena dari sebuah judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi, adapun judul dalam karya ilmiah yang penulis bahas dalam Skripsi ini adalah KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus), untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul proposal ini maka perlu di berikan penjelasan istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) atau yang di sebut dengan nama lain Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.¹ Melalui fungsinya sebagai legislatif, BHP mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijaksanaan BHP harus berlandaskan terhadap kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat yang diwakilinya. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan pekon, BHP di Pekon Pampangan bertindak sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan Kepala Pekon.

Tugas dan wewenang Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pihak BHP dalam setiap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selalu dilakukan dengan mengadakan musyawarah, masyarakat

¹Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru. Hal 13

selalu dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi. BHP juga berperan aktif dalam musyawarah tersebut, setelah melakukan setiap kegiatan mereka melakukan evaluasi mengenai kegiatan yang telah berlangsung baik itu dalam kegiatan yang bersifat pembangunan maupun yang lainnya yang berasal dari aspirasi masyarakat. BHP menjalankan wewenangnya untuk menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Musyawahar Pekon adalah musyawarah antara BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Pekon yang dijalankan selama ini di Pekon Pampangan berjalan masih kurang efektif, ini dapat dilihat dari komunikasi yang bersifat satu arah, dimana pemerintah desa yang lebih aktif menyampaikan program yang akan dijalankan, sedangkan masyarakat lebih banyak diminta persetujuannya saja.

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.² Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Menurut Pengamatan Penulis di Pekon Pampangan menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintah.

²Adianto dan Hasim As'ari. *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 14. Nomor 1. (Juli 2016) : 23-32 <https://jiana.ejournal.unri.ac.id>

Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya secara manusiawi.³ Pembangunan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pembangunan dalam Bidang Fisik di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah pekon maka perlu adanya Musyawarah Desa (**MUSDES**) yang bertujuan untuk mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari musyawarah Pekon. Dalam proses perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan perlu adanya keikutsertaan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaannya. Dalam musyawarah pekon masyarakat sama-sama mengusulkan pemeliharaan gedung posyandu dan rabat beton harus diutamakan, namun Kepala Pekon tidak menyepakati keinginan masyarakat untuk mengutamakan pembangunan tersebut. Sehingga Badan HIPPUN Pemekonan mengambil peran aktif sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta mewujudkan keinginan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan diselenggarakan pemerintah pekon untuk menjembatani dan melakukan evaluasi agar yang di inginkan oleh masyarakat dapat terealisasikan.⁴

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa, maksud judul skripsi ini adalah bagaimana kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pekon, penelitian ini dilakukan di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan menganalisis kinerja BHP dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon serta menganalisis koordinasi yang dilakukan BHP dengan Kepala Pekon Pampangan dalam mewujudkan realisasi pembangunan pada tahun 2021.

³ Kumba Digdo Wiseiso. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lpu_Unas, 2019. Hal 6.

⁴ Nur Zaman. Ketua Badan HIPPUN Pemekonan. *Observasi*. Maret 3, 2022.

B. Latar Belakang Masalah

Demokrasi Indonesia masih menempuh jalan panjang salah satunya pada tatanan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sebagai mana diupayakan dan yang lebih tampak digarap adalah demokrasi di atas desa (*supra village structure*) berada pada kondisi yang masih jauh panggang dari pada api. Jika dilihat dari perjalanan panjang demokrasi di atas desa saja masih lambat mengisi format dan volumenya apalagi ditingkat desa, dipastikan persoalannya sangat kompleks dan rumit serta sangat diperlukan waktu yang jauh lebih lama untuk menuju kondisi di Indonesia sangat heterogen.⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/pekon di Bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yaitu Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa/pekon dan juga sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, sebagai mana Firman Allah swt dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Qs. An-Nisa: 58.⁶

⁵Rahyunir Rauf dan Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Tp. 2016. Hal 3

⁶<https://tafsirq.com/topik/an+nisa+ayat+58> (diakses pada 26 Februari 2022, Pukul 21.47).

Amanah itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menunaikan amanah, maksudnya secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi, dicurangi, dan tidak pula diulur-ulur, dan termasuk dalam amanah disini adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia, dan perintah-perintah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Sesungguhnya para ahli fikih telah menyebutkan bahwa barangsiapa yang diserahkan kepadanya suatu amanah, maka ia wajib menjaga amanah tersebut dalam suatu tempat yang patut, mereka berkata, “Karena sesungguhnya tidaklah mungkin dapat ditunaikan kecuali dengan menjaganya, maka wajiblah hal itu dilakukan” dan Firman Allah, “Kepada yang berhak menerimanya,” sebuah dalil bahwa tidaklah diserahkan dan ditunaikan kepada selain orang yang berhak menerimanya, dan wakil orang tersebut adalah dalam posisinya, sehingga apabila ia menyerahkannya kepada selain orang yang berhak menerimanya, maka ia tidaklah dikatakan telah menunaikannya. “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,” hal ini mencakup hukum diantara mereka dalam perkara darah, harta, maupun kehormatan, baik sedikit maupun banyak, terhadap yang dekat maupun yang jauh, seorang yang baik maupun yang jahat, seorang teman maupun musuh. Maksud dari adil disini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengannya yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan RasulNya berupa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Hal ini menuntut untuk mengetahui keadilan agar dapat menetapkan hukum dengannya, dan ketika perintah-perintah tersebut adalah suatu yang baik dan adil, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” ini merupakan pujian dari Allah bagi perintah-perintahNya dan larangan-laranganNya, karena mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat dan menolak kemudharatan pada keduanya, karena sesungguhnya Dzat yang mensyariatkannya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,

yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagiNya dan Dia mengetahui kemaslahatan hamba, yang mereka sendiri tidak mengetahuinya.⁷

Badan Hippun Pemekonan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Hippun Pemekonan (BHP) semakin dikuatkan sebagai Lembaga Permusyawaratan di Tingkat Pekon. Penguatan tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Hippun Pemekonan mengacu pada regulasi desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Kelembagaan di Tingkat Pekon, Memperkuat Kebersamaan, serta Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Memfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Pekon. Dalam Permendagri Nomor 110/2016 tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon, dan melakukan pengawasan kinerja kepala pekon.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Pasal (3) Menyebutkan Badan Hippun Pemekonan ialah berfungsi menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan.⁹

Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

⁷<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diakses pada 26 Februari 2022, pukul 22.14)

⁸ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Badan Hippun Pemekonan*

Kenyataan yang terjadi sekarang ini, hampir setiap desa/pekon di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BHP yang signifikan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan pekon, terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pembentukan peraturan pekon lebih banyak atau hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah pekon tanpa melibatkan lembaga legislatif pekon, apalagi melibatkan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Pekon Pampangan, tidak semua aspirasi masyarakat dapat disalurkan kepada Pemerintah Pekon.

Mempelajari peran BHP haruslah diketahui aturan dan fungsi dari pada peran BHP tersebut indikator atau ukuran peran itu tentunya dapat merefleksikan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari BHP. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja dari Badan HIPPUN Pemekonan sebagai mitra dari pemerintah pekon adalah bagaimana kinerja dari BHP dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan wewenang yang telah diamanahkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Pekon.¹⁰

Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah pekon maka perlu adanya Musyawaharah Desa (Musdes) yang bertujuan untuk mensingkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari musyawarah Pekon. Berikut adalah daftar kehadiran musyawarah desa (Musdes) pada Pekon Pampangan.¹¹

Tabel 1.1
Musyawaharah Desa

No	Nama	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Fathul Ilmi	Kepala Pekon	1
2	Nur Zaman	Kepala BHP	1
3	Faizar Ilmi	Wakil BHP	1
4	Tarmizi	Sekretaris BHP	1
5	Norma Riansah	Anggota BHP	1
6	Amsir	Anggota BHP	1

¹⁰Nurleli. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penetapan Peraturan Pekon*. Skripsi, Bandar Lampung: UIN Lampung, 2020. Hal 4-5.

¹¹Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes). Kantor Pekon Pampangan.

No	Nama	Keterangan	Jumlah (Orang)
5	Husen Amir	Aparatur Desa	1
6	Ramzi	Pendamping Desa	1
7	Ahmad Isnaini	Kepala Dusun Pampangan	1
8	Muhamad Azmi	Kepala Dusun Sukapura	1
9	Natsir	Kepala Dusun Penantian	1
10	Fajar	Kepala Dusun Pedagangan	1
11	Roziqul Qarib	Tokoh Masyarakat Dusun Pampangan	1
12	Amran	Tokoh Masyarakat Dusun Sukapura	1
13	Arif Muhamad	Tokoh Masyarakat Dusun Penantian	1
14	Ismail Hadi	Tokoh Masyarakat Dusun Pedagangan	1
15	Tamzizi	Anggota karang taruna	1
	Jumlah		15

Pada pengadaan pembangunan Tahun Anggaran 2021 Pekon Pampangan mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilaksanakan pada hari Selasa 29 Desember 2020 yang diikuti oleh Pemerintahan Pekon, BHP, serta tokoh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1, yang membahas tentang perencanaan pembangunan fisik, musyawarah ini sendiri di selenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) yang bertujuan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Langkah ini dianggap merupakan sarana yang telah di sediakan untuk Masyarakat Pekon Pampangan agar bisa berperan serta menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Pemerintah Pekon, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang berlandaskan semangat mewujudkan pembangunan tanpa ada yang merasa dirugikan atau dengan kata lain pembangunan tidak di arahkan pada pola *top-down* dimana banyak mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga banyak aspirasi masyarakat tidak tersampaikan.

BHP melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam

musyawarah Pekon, dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat BHP melakukan melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BHP maupun hasil penggalan aspirasi oleh BHP dicatat dalam buku aspirasi BHP. Pimpinan BHP menugaskan masing-masing bidang di BHP untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi yang sudah masuk dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BHP terhadap hal strategis yang akan di bahas dalam musyawarah pekon.

Dalam urusan kepanitian Musyawarah Pekon Pampangan dipimpin oleh kepala pekon, serta dibantu oleh anggota BHP dan aparatur pekon, keanggotaan panitia musyawarah bersifat sukarela namun dalam kenyataannya perencanaan pembangunan pekon relatif belum dilaksanakan secara terpadu prosedur dan tata cara penyelenggaraan pembangunan musdes tidak menganut prinsip musyawarah mufakat, kepala pekon cenderung mengabaikan keinginan masyarakat dalam kata lain segala keputusan ada pada tangan kepala pekon.¹²

Selanjutnya diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan pada Bulan Maret 2021 sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada Pekon Pampangan. Berikut adalah daftar kehadiran Musrenbang pada Pekon Pampangan.¹³

Tabel 1.2
Musyawarah Rencana Pembangunan

No	Nama	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Agus	Sekretaris Camat	1
2	Munhayat	Kasi Pembangunan (Kecamatan)	1
3	Jalaluddin	Kasi Pemerintahan (Kecamatan)	1
4	Fathul Ilmi	Kepala Pekon	1
5	Delpa Sina Putra	Sekretaris Desa	1
6	Azhari	Kasi Pembangunan (Desa)	1
7	Supendi	Kasi Pemerintahan (Desa)	1

¹²Nur Zaman. Ketua Badan Hippun Pemekonan. *Observasi*. Februari 2, 2022.

¹³Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Kantor Pekon Pampangan.

No	Nama	Keterangan	Jumlah (Orang)
8	Nur Zaman	Kepala BHP	1
9	Tarmizi	Sekretaris BHP	1
10	Norma Rianschah	Anggota BHP	1
11	Amsir	Anggota BHP	1
12	Husen Amir	Aparatur Desa	1
13	Ramzi	Pendamping Desa	1
14	Ahmad Isnaini	Kepala Dusun Pampangan	1
15	Muhamad Azmi	Kepala Dusun Sukapura	1
16	Natsir	Kepala Dusun Penantian	1
17	Fajar	Kepala Dusun Pedagangan	1
18	Roziqul Qarib	Tokoh Masyarakat Dusun Pampangan	1
19	Amran	Tokoh Masyarakat Dusun Sukapura	1
20	Arif Muhamad	Tokoh Masyarakat Dusun Penantian	1
21	Ismail Hadi	Tokoh Masyarakat Dusun Pedagangan	1
22	Tamzizi	Anggota karang taruna	1
		Jumlah	22

Musyawarah Pekon dalam Musrenbang seperti pada Tabel 1.2 yang dipimpin oleh Kepala Pekon dan dihadiri oleh berbagai pihak yang berkepentingan, keterwakilan perempuan relatif kurang tampak, dalam penjangkaran aspirasi hanya satu arah, cenderung tidak terjadi diskusi, sementara itu perangkat pekon cenderung tidak berpartisipasi dalam musyawarah, musyawarah hanya di lakukan dalam waktu singkat (2 jam), sehingga beberapa peserta merasa tidak puas dengan hasil musyawarah.

Dalam musyawarah tersebut masyarakat sama-sama mengusulkan pemeliharaan gedung posyandu dan rabat beton harus diutamakan, namun kepala pekon tidak menyepakati keinginan masyarakat dengan alasan gedung tersebut masih layak digunakan dan alangkah baiknya dana itu direalisasikan untuk prioritas yang lain, padahal hal tersebut merupakan skala prioritas karena merupakan pengerjaan yang sudah tertunda dari tahun sebelumnya. Selain itu mengenai pembukaan badan jalan masyarakat menginginkan tepat dibuka di perbatasan tanah antar

masyarakat akan tetapi kepala pekon tidak menyepakati karena beliau beranggapan lokasi tersebut kurang strategis dan juga berdekatan dengan jurang. Sehingga dalam hal ini harus ada solusi agar apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat tercapai, oleh karenanya BHP sebagai mitra yang sejajar dengan kepala pekon juga sebagai penyelenggara musyawarah berperan aktif dalam mengadakan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pekon dan kemampuan BHP dalam berkoordinasi dengan kepala pekon dalam mewujudkan realisasi pembangunan pada Tahun 2021 menjadi hal yang penting untuk diamati terkait bagaimana pencapaiannya.

Berikut tabel prioritas dan realisasi pembangunan yang ada di Pekon Pampangan Tahun Anggaran 2021 yang dibahas pada Musdes dan Musrenbang:¹⁴

Tabel 1.2
Prioritas dan Realisasi Pembangunan pada Pekon Pampangan Tahun Anggaran 2021

No	Nama Dusun	Prioritas Pembangunan	Realisasi Pembangunan	Sumber Dana
1	Pampangan	Pembukaan badan jalan, anderalah, rehap gedung posyandu, rehap gedung puskesmas, gorong-gorong	Pembukaan badan jalan, rehap gedung posyandu, gorong-gorong	Dana desa
2	Sukapura	Drainase, rabat jalan lingkungan, gorong-gorong, dan talut tebing	Drainase, rabat jalan lingkungan, gorong-gorong, talut tebing	Dana desa
3	Penantian	Rabat jalan lingkungan, drainase, MCK (wc umum)	Rabat jalan lingkungan	Dana desa
4	Pedaganan	Rabat beton, rabat jalan TPU, drainase		Dana desa

¹⁴ Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pekon Pampangan yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Pada tabel di atas dijelaskan tentang prioritas dan realisasi pembangunan Pekon Pampangan Tahun 2021. Dari skala prioritas pembangunan Tahun 2021 tersebut pembangunan yang harus didahulukan dalam keinginan masyarakat adalah rabat beton dan rehap gedung posyandu sebab pada Tahun 2020 pembangunan tersebut tertunda atau tidak terealisasi.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses pemerintahan. Mengingat pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem. Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi ke dalam pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat, dalam pelaksanaannya BHP sebagai lembaga legeslatif di tingkat pekon dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala pekon terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi, yang dapat dilihat dari kurang berhasilnya pihak BHP menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembukaan jalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan untuk pengukur pencapaian keberhasilan kinerja BHP dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan pekon adalah sejauh mana BHP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya dalam pemerintahan pekon, sehingga dalam penelitian ini akan terlihat keefektifan dan keefisienan BHP dalam melaksanakan perannya baik itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga kemampuannya berkoordinasi dengan kepala pekon dalam merealisasikan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **KINERJA BADAN HIPUN**

PEMEKONAN (BHP) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada hasil permasalahan tertentu.

Adapun dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Musyawarah pekon sebagai wadah pembangunan pekon
2. Kepala pekon tidak menyepakati dalam pembangunan prioritas pekon
3. BHP sebagai lembaga legislataif pekon yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Pembangunan pekon sebagai wujud partisipasi masyarakat
5. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan pekon

Adapun sub-fokus penelitian ini adalah:

1. Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan yang ada di Pekon Pampangan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon
2. Koordinasi Badan HIPPUN Pemekonan dengan Kepala Pekon Pampangan dalam mewujudkan realisasi pembangunan pada Tahun 2021

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon?

2. Bagaimana koordinasi Badan Hippun Pemekonan dengan Kepala Pekon Pampangan dalam mewujudkan realisasi pembangunan pada tahun 2021?

E. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang di lakukan sesungguhnya akan dilakukan setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapat di kemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Hippun Pemekonan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon.
2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi Badan Hippun Pemekonan dengan Kepala Pekon Pampangan dalam mewujudkan realisasi pembangunan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik itu manfaat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Ushuluddin khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat yaitu untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial, pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu adalah merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral, selain itu juga kajian terdahulu adalah bagian dari skripsi yang paling utama artinya melalui suatu kajian terdahulu tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.

Sejauh peneliti mencari sumber data tentang judul penelitian di atas, penelitian ini tidak sama dengan peneliti terdahulu. Meskipun dapat persamaan dalam penelitian berbentuk karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang Badan HIPPUN Pemekonan peneliti mengarahkan pada Kinerja BHP dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Tislam Nur Karin, skripsi yang berjudul “Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon” (Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Pada penelitian tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini. Persamaan tersebut terdapat pada objek yang diteliti yaitu Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi kerja antara Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan Banjar Sari, mulai dari perencanaan pembangunan Pekon sampai kepada tahap evaluasi, selain itu juga yaitu tidak menunjukkan hubungan kerja yang baik, seperti tidak kerja sama, komunikasi yang berjalan kurang baik, BHP lebih menjalankan *controlling* dan kurang dalam menjalankan fungsi mitra bersama Kepala Pekon. Intensitas pertemuan yang sangat minim, kurangnya keterbukaan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan pembahasan yang lebih mengerucut dalam peran BHP

dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon.¹⁵

2. Maulana Rendra Yuda, Mahasiswa Universitas Lampung, Skripsi Yang Berjudul “Penerapan Fungsi Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini. Persamaan terletak pada objek yang di teliti yaitu Badan HIPPUN Pemekonan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa penerapan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa dilihat dari dua tahap yaitu proses menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Proses tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan peraturan desa. Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian serta pembahasan yang lebih mengerucut dalam meneliti peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon.¹⁶
3. Nurleli “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam Penetapan Peraturan Pekon” (Studi di Pekon Banjar Agung Ilir, Kabupaten Tanggamus). Pada penelitian tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini. Persamaan tersebut terdapat pada objek yang di teliti yaitu Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan, hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi peran BHP belum terlaksana dengan baik dan beberapa tugasnyapun belum sesuai dengan

¹⁵ Tislam Nur Karin. *Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon, (Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*. Jurnal Pemikiran Politik Islam. Juni 12, 2017. Hal 37-55.

¹⁶ Maulana Rendra Yuda. *Penerapan Fungsi Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu) Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal 52-70.

yang ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian serta pembahasan yang lebih mengerucut dalam meneliti kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Pekon.¹⁷

4. Agung Pratama “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah “(Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus). Pada penelitian tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini. Persamaan tersebut terdapat pada objek yang di teliti yaitu Lembaga Badan HIPPUN Pemekonan atau yang di sebut dengan nama lain yaitu Badan Permusyawaratan Desa, penelitian ini lebih menekankan kepada pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa, adapun perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan pembahasan yang lebih menekankan kepada kinerja Badan HIPPUN Pemekonan dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat.¹⁸

Berdasarkan dari tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti susun ini memiliki perbedaan dengan karya karya ilmiah yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya, perbedaan itu terletak pada fokus pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pekon (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).

¹⁷Nurleli. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam Penetapan Peraturan Pekon*. Hal 60.

¹⁸Agung Pratama “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*“(Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus). Skripsi, Bandar Lampung: UIN Lampung, 2021.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian,¹⁹ dalam hal ini data yang diperoleh dari kantor BHP yang ada di Pekon Pampangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data kemudian di simpulkan,²⁰ *deskriptif* adalah metode pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat serta terarah.

3. Operasional Penelitian

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Kinerja

Menurut **Samsuddin** kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan.²¹

b. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan

¹⁹ Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰ Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. Hal 106.

²¹ Dedi Rianto Rahadi. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang, Tunggal Mandiri Publishing. Hal 1.

datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.²²

c. Koordinasi

Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun kemudian diolah oleh peneliti.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari informasi utama yang dikumpulkan yang diambil langsung dari sumber-sumber informasi lainnya. Disini penulis memperoleh data dari informan secara langsung melalui observasi maupun wawancara.

Tabel 1.4
Data Primer (Informan)

No	Nama	Keterangan
1	Nur Zaman	Ketua Badan Hippun Pampangan
2	Fathul Ilmi	Kepala Pekon
3	Rozikul Qorib	Tokoh adat dan masyarakat Pekon Pampangan
4	Tamzizi	Anggota karang taruna Pekon Pampangan

Adapun cara lain yang di pakai untuk memilih informan penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yaitu salah satu teknik non-probabilitas yang di terapkan, terutama dalam sebuah penelitian sosial. Sampel teknik yang diterapkan untuk

²²Adianto dan Hasim As'ari. *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 14. Nomor 1. (Juli 2016):23-32
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id>

²³*Ibid.*,175.

menentukan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian, sampel yang terpilih diminta untuk memilih teman-temannya atau hal yang berhubungan dengan kriteria untuk dijadikan sampel dan seterusnya. Dengan teknik ini nantinya jumlah sampel akan semakin besar dan banyak.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memeperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain baik dalam bentuk laporan, arsip maupun catatan dokumen kantor yang telah di berikan untuk bahan penelitian serta undang-undang, dan peraturan daerah setempat.²⁵

Tabel 1.5
Data Sekunder

No	Penulis	Judul	Relevansi
1	Rahyunir Rauf dan Maulidah	Badan Permusyawaratan Desa	Menjadi sumber referensi tentang bagaimana peran BPD/BHP
2	Gusti Lanang Parta Tanaya	Musyawahar desa dalam perencanaan pembangunan desa	Menjadi sumber tentang tata cara musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan

²⁴ Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Majur.

²⁵“Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib di Keta....,” di Akses November 05, 2022. <https://dqqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanggung jawab dan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden).²⁶ Dalam hal ini penulis menanyakan secara lengkap, jelas dan terarah mengenai kinerja Badan HIPPUN Pemekonan kepada pihak terkait dan masyarakat di pekon.²⁷

b. Dokumentasi Pampangan

Metode *dokumentasi*, yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas berkas berkaitan dengan topik penelitian yang diambil melalui izin lapangan.²⁸ Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan lapangan.²⁹

c. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra, metode ini digunakan dengan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang telah dikemukakan dari responden melalui interview.³⁰

²⁶Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Lapangan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 102.

²⁷Burhan Ashshofa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 95.

²⁸*Ibid.*, 217

²⁹Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Pustaka Ilmu Grup.

³⁰Suharsimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 57

Mengingat bahwa data yang didapatkan melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Peneliti yang ada dalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh BHP Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugasnya kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di lapangan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah literatur mengenai data telah terkumpul berdasarkan sumber yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah penelitian sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap atau relevan dengan masalah.³¹
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A masalah ke dua tanda B dan seterusnya).³²
- c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami.³³
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan sistematika bahasa yang berdasarkan urutan permasalahan.³⁴

³¹ Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Hal. 72-79.

³² Sudaryono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers. Hal 110.

³³ *Ibid.*, 200.

³⁴ *Ibid.*, 203.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dalam metode kualitatif ditemukan dalam proses pengumpulan data dalam proses tertentu. Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang merupakan kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami.

Dalam analisis *kualitatif* penulis menggunakan metode berfikir *deduktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.³⁵

I. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Kerangka teori disini menjelaskan bahwa adanya masalah dalam proses perencanaan pembangunan.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh **Samsuddin**, teori tersebut di gunakan untuk menganalisis “Kinerja BHP dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pekon”.

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun lembaga.

Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban yang harus di jalankan BHP sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil

³⁵Sudaryono (2003). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*.

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam sebuah organisasi sesuai dengan wewenangnya, kaitan teori kinerja dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis rumusan masalah penelitian yang pertama.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menjadi mengetahui bagaimana kinerja dari BHP, berdasarkan teori kinerja ini peneliti membahas wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh BHP yang memiliki kedudukan tertentu didalam masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Teori

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua, memuat kajian teoritis yang isinya membahas tentang kinerja, tinjauan pemerintahan pekon, aspirasi masyarakat pekon, dan pembangunan pekon.

Bab Tiga, membahas objek penelitian yang memuat sejarah Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), AD/ART BHP, Struktur Organisasi serta Lokasi BHP.

Bab Empat, analisis data penelitian yang memuat tentang kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan pekon serta koordinasi Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dengan kepala pekon dalam mewujudkan realisasi pembangunan.

Bab Lima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya.



BAB II

KINERJA, BHP, ASPIRASI MASYARAKAT, PEMBANGUNAN

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut **Samsuddin** kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan.³⁶

Menurut **Miner**:

Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya, setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang di tetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang di gerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.³⁷

Kinerja (*performance*) merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dapat dihasilkan, kinerja merupakan alat ukur bagi pencapaian organisasi. Kinerja dapat di pandang sebagai *thing done*. **Hasibuan** mengartikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

³⁶Dedi Rianto Rahadi. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang, Tunggul Mandiri Publishing. Hal 1.

³⁷ Jhon Miner. (1990). *Organizational Behavior: Performance and Productivity*. New York: Random House.

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.³⁸

Dalam sistem berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan, hasil dari seperangkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi usaha kinerja lainnya. Karena saling bergantung, apa yang tampaknya merupakan perolehan kinerja yang kecil dalam suatu aspek pekerjaan dapat menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan, jadi, produktivitas suatu sistem bergantung pada kecermatan dan efisiensi perilaku kerja.

Dalam Sutrisno menyatakan bahwa perilaku seseorang akan terbawa dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun publik, bila suatu organisasi mempunyai SDM yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, moral yang tinggi, hukum yang andal, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan mempunyai kinerja yang baik, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:³⁹

- a. Bagaimana mengorganisasikan berbagai kegiatan dan memobilisasi para anggota yang ada dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Bagaimana mengelola para anggota organisasi secara efektif, agar tujuan organisasi dapat tercapai disertai efisiensi yang tinggi.
- c. Bagaimana menciptakan kondisi organisasi, sistem balas jasa dan hukuman untuk menunjang suasana kerja agar tercapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Dari uraian mengenai kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu yang telah di kerjakan dalam organisasi sesuai tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan kepada individu atau kelompok kerja guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

³⁸ Hasibuan S.P. Malayu. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara.

³⁹Edy Sutrisno. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 175.

2. Indikator Kinerja

Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik itu baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu dalam mewujudkan tujuan dan misinya,⁴⁰ menurut **Mustopadjadja** menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat di gunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Indikator masukan (*input*) yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya. Contoh: jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat, peralatan yang digunakan.
- b. Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
- c. Indikator keluaran atau (*output*) yakni segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. Contoh: jumlah kegiatan yang di rencanakan, jumlah pelatihan yang di lakukan.
- d. Indikator hasil (*outcome*) yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Contoh: tingkat kepuasan, tingkat pemahaman.
- e. Indikator manfaat (*benefit*) yakni segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh oleh indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai

⁴⁰ A. Dwiyanto. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada. Hal 15.

⁴¹Mustofadidjadja AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.

bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

- f. Indikator dampak (*impact*) yani pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau panjang. Ini menunjukkan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: peningkatan hasil positif penurunan hal negatif.

Pengukuran dan manfaat penilaian kinerja organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada diharapkan akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus (berkelanjutan)

3. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*)

- a. Faktor kemampuan (*ability*): secara psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan *reality* artinya pimpinan dan anggota yang memiliki potensi di atas rata-rata, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan kinerja yang maksimal.
- b. Faktor motivasi (*motivation*): motivasi di sini diartikan sebagai suatu sikap, mereka yang bersikap positif (pro) dalam suatu kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya.

Menurut **Henry Simamora** kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:⁴²

- a. Faktor individu, yang terdiri dari: kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi.
- b. Faktor psikologis, yang terdiri dari: persepsi, *attitude*, *personality*, pembelajaran, motivasi.

⁴² Anwar Prabu Mangkunegara. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 14.

c. Faktor organisasi yang terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, *job design*.

Menurut A. Dale Timpe dalam Mangkunegara (2007: 15), faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang, misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan fasilitas kerja dan iklim organisasi.

Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang dibuat anggota memiliki sebuah akibat psikologis dan berdasarkan pada tindakan, seseorang anggota yang menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti kemampuan atau upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak perasaan positif tentang kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti kemampuan dan upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak perasaan positif, tentang kinerjanya dibandingkan jika dengan dia menghubungkan kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal. Seperti nasib baik, suatu tugas yang mudah atau ekonomi yang baik.

Jenis atribusi yang dibuat seorang pimpinan tentang kinerja seorang bawahan mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap bawahan tersebut, misalnya, seorang pimpinan yang mempermasalahkan kinerja buruk seorang bawahan karena kekurangan ikhtiar mungkin diharapkan mengambil tindakan hukum, sebaliknya pimpinan yang tidak menghubungkan dengan kinerja buruk dengan kekurangan kemampuan/ keterampilan, pimpinan akan merekomendasikan suatu program pelatihan. Oleh karena itu jenis atribusi yang dibuat oleh seorang pimpinan dapat

menimbulkan akibat-akibat serius dalam cara bawahan tersebut diperlukan.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor yang muncul dari diri individu. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja yang berasal dari lingkungan kerja. Dari hasil kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti ini akan menjadi alat ukur bagai mana kinerja BHP Pekon Pampangan.

B. Tinjauan Pemerintahan Pekon

1. Pemerintahan Pekon

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menegaskan bahwa pekon tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, akan tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri masyarakat pekon yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap pekon berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat.⁴³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 Ayat 1 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu pemerintah pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan,⁴⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pemerintah pekon adalah kepala pekon yang di bantu oleh perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintah pekon.

Penyelenggaraan pemerintahan pekon merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pekon memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa ialah satu kesatuan hukum

⁴³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan tertentu. Desa adalah bentuk pemerintahan terendah dalam wilayah NKRI dan Negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang desa memberikan dampak perubahan penyelenggaraan pemerintahan pekon. Desa/pekon sebagai bentuk pemerintahan terkecil diberikan kewenangan untuk mengadakan pemerintahan desa agar dapat mengurus kepentingannya sendiri. Pekon Pampangan sebagai bentuk pemerintahan terkecil diberikan kewenangan untuk mengadakan pemerintahan pekon agar dapat mengurus kepentingannya sendiri. Pekon Pampangan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya tanpa campur tangan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintahan pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pekon yaitu kepala pekon beserta perangkatnya dan Badan HIPPUN Pemekonan sebagai unsur penyelenggara. Pemerintah pekon merupakan lembaga eksekutif pekon dan BHP sebagai lembaga legislatif pekon. Penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai wujud adanya otonomi yang di berikan pemerintah daerah kepada pekon, dengan aparat pemerintah pekon sebagai penyelenggara pemerintahannya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekon.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan pemerintahan pekon dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan dan kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah BHP sebagai mitra yang sejajar dengan kepala pekon sebagai penyalur aspirasi masyarakat

⁴⁵Abdulloh (2011). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 167.

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai pembangunan pekon yang maju dan mempercepat kesejahteraan bersama.

2. Kepala Pekon

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 menjelaskan bahwa kepala pekon dipilih langsung oleh dan dari penduduk pekon warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.⁴⁶ Pasal 26 tentang Desa menerangkan bahwa kepala pekon bertugas menyelenggarakan pemerintahan pekon, melaksanakan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon.⁴⁷

Pemerintah pekon terdiri dari kepala pekon dan perangkat pekon terdiri atas sekretariat pekon, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat pekon bertugas membantu kepala pekon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pemerintah pekon diuntut untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang demokratis yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan sebagai wujud dari demokrasi Indonesia dengan memberikan pelayanan optimal yang memerhatikan akan kebutuhan masyarakat guna mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat pekon.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kepala pekon adalah:⁴⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat pekon
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset pekon
- d. Menetapkan peraturan pekon
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat pekon

⁴⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Desa.

⁴⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat pekon
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian pekon serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya masyarakat pekon
- i. Mengembangkan sumber pendapatan pekon
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat pekon
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan pembangunan pekon secara partisipatif
- n. Mewakili pekon di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks penelitian ini tugas dan kewajiban kepala pekon pampangan salah satunya adalah mengordinasikan pembangunan pekon secara partisipatif, sebagai mitra yang sejajar dari BHP khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal demi terwujudnya keinginan masyarakat.

3. Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)

Badan HIPPUN Pemekonan merupakan lembaga legislatif Pekon yang berfungsi menampung dan menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa/pekon.⁴⁹

BHP beranggotakan pemuka masyarakat di desa dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa/pekon agar mampu menggerakkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat pekon. Di desa terdapat dua institusi berbeda, yaitu Pemerintah Desa dan

⁴⁹Ibid., 95.

Badan Perwakilan Desa atau Badan HIPPUN Pemekonan, keduanya saling independen.⁵⁰ Dalam kata lain pemerintah pekon sebagai eksekutif dan BHP sebagai legislatif. BHP terdiri dari penduduk pekon yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka adat dan tokoh atau pemangku lainnya. Tujuan dari pembentukan BHP adalah untuk memperkuat pemerintahan pekon serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan pancasila. BHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Pasal 36 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1989 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa bahwa BHP memiliki fungsi:

- a. Mengayomi yaitu: menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Pengawasan yaitu: meliputi pengawasan terhadap pengawasan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan desa.
- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu: menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, BHP adalah sebuah lembaga legistalif di tingkat pekon yang salah satunya fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BHP juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang menyalurkan aspirasinya dan berkedudukan sejajar dengan kepala pekon.

⁵⁰Maulidah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Hal 14.

⁵¹Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999 Pasal 36 Tentang *Pedoman Umum Pengaturan Desa*.

C. Aspirasi Masyarakat

1. Pengertian Aspirasi

Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.⁵² Aspirasi lebih menunjukkan akan keinginan hal yang lebih baik atau tinggi tingkatnya dengan tujuan mencapai kemajuan tertentu. Aspirasi juga diartikan keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita. Aspirasi dalam Bahasa Inggris *aspiration* berarti cita-cita, *aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau keinginan. Aspirasi juga didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang.

Menurut **Purwadarminta** aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah, keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup, sehubungan dengan rencana hidup, **Hurlock** menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang.⁵³

Jadi peneliti menyimpulkan bahwasanya aspirasi merupakan harapan dan tujuan seseorang dalam memperoleh target.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok, kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk

⁵²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.KBBI (2007). Jakarta: Balai Pustaka. Hal 72.

⁵³Zuhriansyah. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Perumahan (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan)*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Volume 2 Edisi 2. (Juli-Desember 2013). Hal 313.

memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

Menurut **Selo Soemardjan** mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.⁵⁴ **Max Weber** mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan padaarganya.⁵⁵

3. Pengertian Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai pranata/tatanan sosial yang dibentuk dari individu-individu yang heterogen serta menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah satuan terikat satu sama lain yang memiliki harapan dan tujuan yang sama. Sedangkan jika dikaitkan dengan aspirasi maka dapat didefinisikan sebagai harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat seperti pelaksanaan rencana tata ruang. Jadi aspirasi masyarakat adalah harapan, kebutuhan dan pendapat rakyat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pembangunan dan pelayanan umum.⁵⁶

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok, kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyogyanya

⁵⁴Tejokusumo. (Maret 2014). *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Geo Edukasi. Volume III Nomor 1.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah, hal ini lebih terlihat di era desentralisasi pemerintahan seperti sekarang ini.⁵⁷

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan secara sistematis mengarah pada kondisi yang lebih baik, melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistmatis, menunjukkan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat.

Menurut **Archon Fung** secara umum dikenal metode untuk untuk memahami aspirasi masyarakat yaitu:⁵⁸

- a. Luas lingkup aspirasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi masyarakat: yang pertama, *self selected*, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, *rekrutmen* terseleksi, yaitu hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses kebijakan, ketiga, *random selection* yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas. Keempat, *lay stakeholders*, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga Negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar, sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu.

⁵⁷Eko Priyo Utomo. *Strategi Komunikasi dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bentuni Provinsi Papua Barat*. Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol 2, No. 4 Oktober-Desember 2013.

⁵⁸Salman Aristo. (2009). *Garuda di Dadaku*. Bandung: DAR! Mizan. Hal 25.

- b. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.

Dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu:

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspirasi.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya. Serta pemerintah bertindak sebagai katalisator, untuk itu anggota BHP yang berkewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat harus lebih dekat dengan masyarakat dan tidak memandang masyarakat sebagai objek dari pembangunan, agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah yang ada bukan memperbanyak masalah yang ada pada masyarakat. Dengan melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

4. Tingkat Aspirasi Masyarakat

Amiruddin secara definitif merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Pada tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Pada

tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang di adakan pemerintah.⁵⁹

a. Aspirasi Tingkat Ide

Aspirasi tingkat ide, konsep aspirasi berarti adalah sebuah gagasan atau ide verbal dari lapisan masyarakat manapun, biasanya aspirasi ini disampaikan secara langsung melalui sebuah forum musyawarah, kotak saran, atau menggunakan media lain, penyampaian aspirasi ini disampaikan baik itu secara tersirat maupun tersurat.

b. Aspirasi Tingkat Peran Struktural

Aspirasi ini merupakan suatu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan, keterlibatan ini bisa berupa materil maupun moril.

Menurut **Archon Fung** secara umum dikenal metode untuk memahami aspirasi masyarakat yaitu:⁶⁰

- a. Luas lingkup aspirasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi masyarakat: yang pertama, *self selected*, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, *rekrutmen* terseleksi, yaitu hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses kebijakan, ketiga, *random selection* yang juga sering di kenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing-masing komunitas. Keempat, *lay stakeholders*, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga

⁵⁹Amiruddin.(2003).*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 3.

⁶⁰ Salman Aristo. (2009). *Garuda di Dadaku*.Bandung: DAR! Mizan.Hal 25.

negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar, sekelompok warga di beri kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu.

- b. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.

Dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu:

- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspirasi.

Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya. Serta pemerintah bertindak sebagai katalisator, untuk itu anggota BHP yang berkewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat harus lebih dekat dengan masyarakat dan tidak memandang masyarakat sebagai objek dari pembangunan, agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah yang ada bukan memperbanyak masalah yang ada pada masyarakat.

Dengan melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan, bahwa aspirasi masyarakat merupakan sebuah gagasan berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk,

jasa, pelayanan, dan lainnya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan.

D. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya⁶¹. Proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi⁶².

Menurut **Bintoro Tjokromidjojo** Pembangunan adalah suatu hal yang berupa usaha untuk berubah dan berkembang dari suatu kondisi dan kondisi masyarakat lokal ke suatu kondisi dan kondisi masyarakat yang dianggap baik.⁶³ Jadi dapat dikatakan pembangunan merupakan suatu perubahan ke hal yang lebih baik dari sebelumnya berupa usaha yang sudah ditetapkan berupa perencanaan kearah yang lebih baik untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pembangunan secara umum identik dengan perubahan yang direncanakan dahulu atau dapat melaksanakan pembangunan khususnya di perkotaan, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam organisasi pemerintahan, agar pembangunan tidak dirasakan oleh sebagian masyarakat saja, tetapi seluruh masyarakat terutama masyarakat kelurahan dapat mengambil manfaat dari hasil pembangunan, itu semua tergantung pada pemerintah tersebut dapat mengajak masyarakat untuk berperan

⁶¹Alexander Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

⁶²*Ibid*, hlm 16

⁶³Bintoro Tjokromidjojo. *No Title*. Hal 189.

aktif dalam proses tersebut. Mereka mengatakan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik.

Menurut **Adimihardja**, pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat, oleh karena itu pembangunan akan berhasil apabila seluruh masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan, yang tidak luput dari bantuan pemerintah.⁶⁴

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari definisi ini dapat muncul tujuh ide pokok⁶⁵ :

- a. Pembangunan adalah suatu proses, artinya pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang tanpa akhir (*never ending*).
- b. Pembangunan adalah upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan perubahan mengandung makna suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu kejangka waktu lain.

⁶⁴Adimihardja Kusnaka. (2004). *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Humaniora. Hal 32

⁶⁵Siagin, Sondang P.(2009). *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 4-5

- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas ini dapat diartikan antara lain sebagai cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional.
- g. Usaha pembinaan bangsa.

Pembangunan sebagai suatu pertumbuhan yang merupakan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pertumbuhan disini mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang. Pembangunan adalah proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis.⁶⁶

2. Pengertian Pekon

Secara etimologi Desa (pekon) berasal dari bahasa *sanssekerta*, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa/pekon diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. **R. Bintaro** menyatakan desa (pekon) juga dapat di katakan sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.⁶⁷ **N. Daldjoene** desa dalam arti umum juga dapat di katakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam.⁶⁸

⁶⁶Kumba Digdowiseisi. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Hal 15.

⁶⁷ R. Bintaro. (2010). *Desa Kota*. Bandung: Alumni. Hal 6.

⁶⁸ N. Daldjoene. (2011). *Instruksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan secara umum pekon merupakan suatu pemukiman masyarakat yang terletak di luar kota dan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

3. Pengertian Pembangunan Pekon

Pembangunan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *community develevement* adalah upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan nasional pada umumnya.⁶⁹

Pada akhir-akhir ini pembangunan masyarakat telah bergeser arahnya kepada pembangunan pekon (*rural development*). Jika berbicara tentang pembangunan masyarakat pekon, maka faktor-faktor pembangunan meliputi aspek pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan daerah perpekonan pada umumnya, pengembangan masyarakat Indonesia lebih ditekankan pada pekon, antara lain karena lebih dari 2/3 penduduk Indonesia berada di daerah perpekonan (baik itu *rural village* maupun *urban village*)

Konsep pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menunjukkan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif bahkan jika memungkinkan dengan swakarsa masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana menggugah dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk proses pembangunan. Problema yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah belum terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan masih ada perbedaan kemajuan antara kelompok masyarakat.⁷⁰

⁶⁹Alhusnaidi Hamim, Dkk. (1996). *Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat*. Lampung: Universitas Lampung. Hal 17.

⁷⁰Tislam Nur Karin. *Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon*. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Juni 12, 2017.

Secara umum pembangunan pekon dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik:

- a. Pembangunan fisik: yaitu pembangunan berupa sarana dan prasarana, seperti jembatan, drainase, gorong-gorong, rabat beton.
- b. Pembangunan non fisik: yaitu pembangunan mental spiritual misalnya penyuluhan keluarga, keluarga berencana, penyuluhan P4, agama, kelompok belajar, perbaikan gizi dll.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pekon adalah upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan nasional pada umumnya, pembangunan pekon secara umum berupa pembangunan fisik dan non fisik. Namun yang dimaksud pembangunan dalam penelitian ini adalah pembangunan fisik.





DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Dwiyanto. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Abdulloh. (2011). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abe, Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adimihardja Kusnaka. (2004). *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* Bandung: Humaniora
- Amiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Prabu Mangkunegara. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- AR, DidjadjaMustofa. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Lapangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristo, Salman. (2009). *Garuda di Dadaku*. Bandung: DAR! Mizan.
- Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bintaro, R. (2010). *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Daldjoene, N. (2011). *Instruksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedi Rianto Rahadi. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Digdowiseisi, Kumba. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Edy Sutrisno. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- Hamim, Alhusnaidi, Dkk. (1996). *Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat*. Lampung: Universitas Lampung.
- Islamiah, *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sanglempongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kumba Digdowiseisi. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Kusnaka, Adimihardja. (2004). *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Humaniora.
- Mahi, Kabul Ali. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.

- Malayu, S.P. Hasibuan. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Miner, Jhon. (1990). *Organizational Behavior: Performance and Productivity*. New York: Random House, 1990.
- Mustofadidjadja AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- P. Siagin Sondang. (2009). *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahadi, Rianto Dedi. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: T.P.
- Sudaryono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjokromidjojo, Bintoro. *No Title*.
- Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.

Sumber Jurnal

Adianto dan Hasim As'ari. "*Model Penerapan Aspirasi Masyarakat*". Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, (Juli 2016) : 23-32 <https://jiana.ejournal.unri.ac.id>

Karin, Nur Tislam. "*Disharmonisasi Antar Lembaga Pekon, (Studi Kasus Kemitraan Antar Lembaga Pekon Terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)*". Jurnal Pemikiran Politik Islam (Juni 12, 2017).

Tejokusumo. "*Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*". Geo Edukasi. Volume III Nomor 1. (Maret 2014).

Utomo, Priyo Eko. "*Strategi Komunikasi dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bentuni Provinsi Papua Barat*" Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol 2, No. 4 Oktober-Desember 2013.

Yuda, Rendra Maulana. "*Penerapan Fungsi Legislasi Badan HIPPUN Pemekonan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu) Tahun 2015*". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 52-70.

Zuhriansyah. "*Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Perumahan (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan)*". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Volume 2 Edisi 2, (Juli-Desember 2013).

Sumber Undang-Undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999 Pasal 36 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Skripsi

Cahyani, Linda. *“Pelaksanaan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”* (Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).

Nurleli, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peran Badan HIPPUN Pemukiman dalam Penetapan Peraturan Pekon”* (Skripsi, Bandar Lampung: UIN Lampung, 2020).

Pratama, Agung, *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah “ (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus).*(skripsi, Bandar Lampung: UIN Lampung, 2021).

Sumber Observasi/ Wawancara

Ilmi, Fathul. *Wawancara.*

Qorib, Roziqul. Tokoh Adat, *wawancara.*

Tamzizi. Tokoh Pemuda Pekon Pampangan, *wawancara.*

Zaman, Nur. “Ketua Badan Hippun Pemekonan”, *observasi*.

Zaman, Nur. “Ketua Badan Hippun Pemekonan”, *wawancara*.

Lain-lain

Dokumentasi Bagan Badan Hipun Pemekonan Pekon Pampangan, dicatat pada Tanggal 12-08-2022.

Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pekon Pampangan yang Bersumber Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pekon Pampangan yang Bersumber Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

<https://tafsirq.com/topik/an+nisa+ayat+58> (diakses pada 26 Februari 2022, pukul 21.47 WIB).

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diakses pada 26 Februari 2022, pukul 22.14 WIB).

<https://dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>. (diakses 05 November 2022, pukul 21.10 WIB)

Lampiran

KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON

(Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

No	Variabel	Indikator	Tujuan
1	Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Input</i> 2. <i>Proses</i> 3. <i>Output</i> 4. <i>Outcome</i> 5. <i>Benefit</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui segala suatu yang dibutuhkan dalam kegiatan 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran 3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam jangka pendek 4. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam jangka menengah 5. Untuk mengetahui hak BHP dalam menjalankan tugasnya
2	Aspirasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspirasi dalam tingkat ide 2. Aspirasi dalam tingkat peran struktural 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memberikan idea tau gagasan terhadap perencanaan pembangunan di pekon 2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pekon
3	Badan Hipun Pemekonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama 2. Kesatuan Tindakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama BHP dengan Kepala

No	Variabel	Indikator	Tujuan
	(BHP)	3. Komunikasi	<p>Pekon Dalam Mewujudkan Perealisasian Pembangunan Pekon</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana kesatuan tindakan BHP dengan Kepala Pekon Dalam Mewujudkan Perealisasian Pembangunan Pekon</p> <p>3. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi BHP dengan Kepala Pekon Dalam Mewujudkan Perealisasian Pembangunan Pekon</p>

Pedoman Wawancara

Wawancara Untuk Responden dengan Judul “Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon” (Studi di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)

Pewawancara :

a. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

b. Perkenalan Diri

1. Perkenalan diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara serta manfaat penelitian

c. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah BHP melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah?

2. Apakah BHP melakukan pembahasan atas hasil aspirasi masyarakat?
3. Apakah BHP mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BHP apa saja sarana dan prasarana yang di gunakan?
5. Apakah ada tunjangan yang di dapat BHP dalam menjalankan tugasnya?
6. Apakah ada program kerja yang jelas yang di jalankan oleh BHP?
7. Bagaimana cara BHP dalam menggambarkan seluruh kegiatan kerja?
8. Apakah BHP ikut serta dalam menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah pekon?
9. Apakah BHP ikut memberikan usul dalam kegiatan rapat?
10. Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?
11. Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan?
12. Bagaimanakah peran dan kewenangan BHP dalam rancangan pembangunan pekon?
13. Bagaimanakah proses laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon dari BHP kepada Kepala Pekon?
14. Bagaimanakah Kesatuan tindakan antara Kepala Pekon dan BHP di Pekon Pampangan?
15. Bagaimana komunikasi BHP dengan Kepala Pekon dalam mewujudkan perealisasi pembangunan pekon?



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721)780887

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI PEKON
PAMPANGAN KEPADA KETUA BADAN HIPUN
PEMEKONAN**

1. Identitas Informan

Nama : Nur Zaman
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Ketua BHP
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pekon Pampangan, Kecamatan Cukuh
 Balak Kabupaten Tanggamus

2. Hasil Wawancara

Peneliti: Apakah BHP melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah?

Nur Zaman: *"BHP pekon pampangan selalu mengundang masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah dan musrenbang yang di lakukan setiap tahunnya, dalam musyawarah tersebut kami telah menampung aspirasi masyarakat antara lain pembukaan badan jalan dan rabat beton."*

Peneliti: Apakah BHP melakukan pembahasan atas hasil aspirasi masyarakat?

Nur Zaman: *"Pembahasan terhadap hasil aspirasi masyarakat pekon pampangan tentu kami lakukan, karna itu merupakan sebuah bagian dari tugas BHP, dalam rapat-rapat yang di adakan tentu BHP slalu ikut serta dalam kegiatan dari pembahasan hasil aspirasi masyarakat karna kami ingin*

segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat dapat terwujud dan berjalan dengan lancar.”

Peneliti: Apakah BHP mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Nur Zaman: *“Sumber pendanaan melalui biaya operasional BHP dan dana-dana dari yang lainnya”*

Peneliti: Dalam menjalankan tugas dan fungsi BHP apa saja sarana dan prasarana yang di gunakan?

Nur Zaman: *“Mengenai sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan tugas tentunya kami menyediakan balai pekon sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, yang kami rasa hal ini akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluh kesahnya”*

Peneliti: Apakah ada tunjangan yang di dapat BHP dalam menjalankan tugasnya?

Nur Zaman: *“Tunjangan yang kami dapatkan sesuai dengan penetapan, pimpinan dan anggota BHP mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kerja, dan setiap kedudukannya memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Untuk ketua BHP mendapatkan Rp.1000.000,00 perbulannya, sedangkan anggota BHP perbulannya mendapatkan Rp. 800.000,00”*

Peneliti: Apakah ada program kerja yang jelas yang di jalankan oleh BHP?

Nur Zaman: *“Program kerja yang jelas dari kepala pekon yaitu tentang pembangunan-pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan juga menyelenggarakan musyawarah pekon entah itu membahas tentang pembangunan maupun pembuatan peraturan pekon”*

Peneliti : Bagaimana cara BHP dalam menggambarkan seluruh kegiatan kerja?

Nur Zaman: *“Kegiatan kami dalam menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dengan cara musyawarah dan mengadakan rapat secara bersama-sama setiap tahunnya”*

Peneliti: Apakah BHP ikut serta dalam menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah pekon?

Nur Zaman: *“BHP dan semua masyarakat yang ada di forum musyawarah selalu dimintai pendapat oleh pemerintah desa disaat pemerintah desa melakukan kegiatan yang bersifat menampung bahkan mewujudkan aspirasi dari masyarakat”*

Peneliti: Apakah BHP ikut memberikan usul dalam kegiatan rapat?

Nur Zaman: *“Menyampaikan usul dan pendapat sering dilakukan apabila kami melaksanakan rapat dan musyawarah”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan dalam rapat evaluasi?

Nur Zaman: *“Evaluasi kegiatan pemerintah Pekon juga kadang-kadang kami melaksanakan dengan cara rapat evaluasi yang dimana disana juga dilibatkan BHP dan masyarakat yang dimana diwakilkan pemuka masyarakat dan lain sebagainya”*

Peneliti: Apa tujuan atau manfaat pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Pekon maupun yang diusulkan oleh BHP akan dibahas secara bersama?

Nur Zaman: *“Tujuan dari program pemerintah pekon itu tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak dan tentunya mendatangkan manfaat yang sangat positif dan membantu*

pekerjaan sehari-hari masyarakat supaya berjalan lebih mudah”

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?

Nur Zaman: *“Tentu diikutsertakan, salah satu aspek aspirasi masyarakat adalah mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan, masyarakat selalu diikutsertakan dan dilibatkan dalam musyawarah, hal ini dilakukan demi terwujudnya keinginan masyarakat demi kebaikan bersama, namun perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut, hanya perwakilan saja seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan?

Nur Zaman: *“Masyarakat pekon tentunya kami libatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan, masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya program pelaksanaan pembangunan, walaupun juga masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam memberikan sumbangan pemikiran yang dalam artian sumbangan pemikiran itu hanya diwakilkan saja oleh para tokoh. Tapi dalam pelaksanaannya pembangunannya mereka sangat antusias sekali walaupun tidak semua, karena memang masyarakat sendiri juga memiliki pekerjaan masing-masing, seperti berkebun dan lain sebagainya.”*

Peneliti: Bagaimanakah peran dan kewenangan BHP dalam rancangan pembangunan pekon?

Nur Zaman: *“Rancangan pembangunan atau peraturan pekon bisa diusulkan oleh BHP maupun kepala pekon, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnya BHP seperti, rancangan peraturan pekon tentang rencana pembangunan*

jangka menengah pekan, rancangan peraturan pekan tentang rencana kerja pemerintah pekan, rancangan peraturan pekan tentang peraturan pekan tentang APB Pekan, dan rancangan peraturan pekan tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Pekan.”

Peneliti: Bagaimanakah proses laporan penyelenggaraan pemerintahan pekan dari BHP kepada Kepala Pekan?

Nur Zaman: *“Laporan yang diserahkan kepada BHP selanjutnya akan kami musyawarahkan untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi pada pekan, setelah ada penjelasan dari kepala pekan maka BHP akan musyawarah kembali sampai laporan tersebut clear”*





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721)780887

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI PEKON
PAMPANGAN KEPADA KEPALA PEKON**

1. Identitas Informan

Nama : Fathul Ilmi
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Pekon
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pekon Pampang, Kecamatan Cukuh
 Balak Kabupaten Tanggamus

2. Hasil Wawancara

Peneliti: Apakah BHP melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah?

Fathul Ilmi: *“Kami dari pihak pekon sangat menerima aspirasi masyarakat, sehingga dalam hal ini kami bersama dengan BHP mengundang masyarakat untuk mengadakan kegiatan musrenbang, yang mana tujuan dari kegiatan ini tak lain untuk supaya masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam setiap pertemuan, kemudian setelah itu kami akan ajukan hasil dari kegiatan tersebut untuk di setuju bahkan mungkin akan di setuju oleh jenjang pemerintah di atas”.*

Peneliti: Apakah BHP melakukan pembahasan atas hasil aspirasi masyarakat?

Fathul Ilmi: *“BHP sudah melakukan pembahasan terhadap hasil aspirasi masyarakat dengan pemerintah pekon,*

sehingga BHP tentunya mengetahui kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dan lain sebagainya”

Peneliti: Apakah BHP mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Fathul Ilmi: *“BHP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BHP mendapatkan dana operasional yang bersumber dari APB pekon, penentuan biaya operasional BHP dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan pekon, dan sumber pendanaan operasional itu salah satu dari alokasi dana desa”*

Peneliti: Dalam menjalankan tugas dan fungsi BHP apa saja sarana dan prasarana yang di gunakan?

Fathul Ilmi: *“Dari pihak pekon tentunya memberikan sarana dan prasarana berupa ruangan yaitu balai pekon, selain itu juga pemerintah pekon memberikan sarana meja dan kursi untuk dapat digunakan dalam musyawarah nantinya”*

Peneliti: Apakah ada tunjangan yang di dapat BHP dalam menjalankan tugasnya?

Fathul Ilmi: *“Tunjangan kedudukan BHP diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BHP, untuk tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal yang terdapat berupa penambahan beban kerja, tunjangan kerja ini berdasarkan pendapatan APB Pekon, sedangkan besaran tunjangan BHP itu ditetapkan oleh Bupati”*

Peneliti: Apakah ada program kerja yang jelas yang di jalankan oleh BHP?

Fathul Ilmi: *“Ada, kalo untuk program kerja yang sangat jelas yaitu mengadakan musyawarah, terlepas dari hasilnya yaitu pembangunan-pembangunan, salah satunya pembukaan badan jalan”*

Peneliti: Bagaimana cara BHP dalam menggambarkan seluruh kegiatan kerja?

Fathul Ilmi: *“Kegiatan yang telah dilakukan melalui musyawarah, rapat dan lain-lain dilaksanakan hampir setiap tahunnya apalagi musrenbang, aspirasi masyarakat kita tampung dan apabila sudah mengadakan rapat baru disana kita bahas satu persatu yang menjadi keluhan bahkan saran dari masyarakat untuk kemajuan pekon bersama”*

Peneliti: Apakah BHP ikut serta dalam menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah pekon?

Fathul Ilmi: *“Dalam Menjalankan rapat yang untuk menyalurkan aspirasi kami selalu meminta pendapat dari semua yang ada di dalam acara rapat tersebut salah satunya BHP dan pemuka-pemuka masyarakat. Barangkali mereka juga ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat”*

Peneliti: Apakah BHP ikut memberikan usul dalam kegiatan rapat?

Fathul Ilmi: *“Didalam melakukan rapat, musyawarah bahkan musrenbang, menyampaikan usul dan pendapat itu sangatlah penting untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi serta argument”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan dalam rapat evaluasi?

Fathul Ilmi: *“Kami ada melakukan evaluasi setiap penyelenggaraan kegiatan bertujuan untuk memperbaiki apa yang kurang dari kegiatan tersebut sehingga tidak di ulang kembali disaat kegiatan selanjutnya”*

Peneliti: Apa tujuan atau manfaat pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Pekon maupun yang diusulkan oleh BHP akan dibahas secara bersama?

Fathul Ilmi: *“Ada, seperti jalan salah satu contohnya. Nah, jalan ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ke kebun masyarakat masing-masing”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?

Fathul Ilmi: *“Ya, masyarakat pekon pampangan sudah cukup berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam memberikan sumbangan pemikiran, hal ini kami lihat dalam forum musyawarah pekon yang mana masyarakat juga ikut serta dalam memberikan gagasan-gagasan terkait pembangunan pekon”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan?

Fathul Ilmi: *“Pelaksanaan program pembangunan di Pekon Pampangan masyarakat ikut dilibatkan, masyarakat juga telah ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan dengan diberikan pekerjaan pada masyarakat yang paham dengan apa yang akan dikerjakan, masyarakat setidaknya ikut memberikan sumbangan tenaga, masyarakat tidak diwajibkan dalam berpartisipasi dalam bentuk dana karna memang untuk prihal dana sudah ada anggarannya, disamping itu masyarakat juga yang tidak terlibat dalam memberikan sumbangan berupa tenaga mereka juga tetap ikut berpartisipasi seperti memberikan makanan dan minuman bagi para pekerja”*

Peneliti: Bagaimanakah peran dan kewenangan BHP dalam rancangan pembangunan pekon?

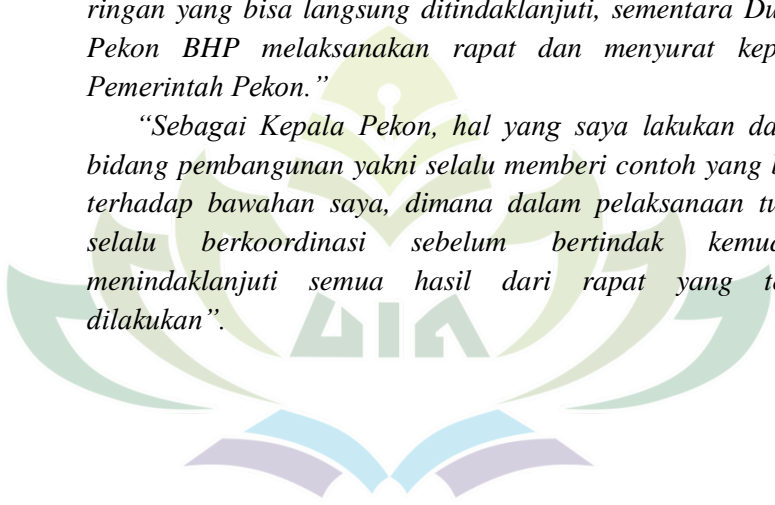
Fathul Ilmi: *“BHP memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan Pekon, di Kecamatan Cukuh Balak sudah ada aturan yang mengatur tentang BHP untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah dengan tujuan perencanaan*

pembangunan di pekon, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar Hukum pedoman teknis untuk BHP dalam melaksanakan fungsinya”.

Peneliti: Bagaimana kesatuan tindakan BHP dengan Kepala Pekon dalam mewujudkan perealisasi pembangunan pekon?

Fathul Iimi: *“Untuk komunikasi kerja dengan BHP kami lebih fleksibel, di luar pertemuan regular seperti musyawarah pekon, BHP dalam penyampaian kepada Kepala Pekon ada 2 yaitu konsultasi dan Duduk Pekon. Untuk Konsultatif penyampaian BHP lebih mengarah pada informasi-informasi ringan yang bisa langsung ditindaklanjuti, sementara Duduk Pekon BHP melaksanakan rapat dan menyurat kepada Pemerintah Pekon.”*

“Sebagai Kepala Pekon, hal yang saya lakukan dalam bidang pembangunan yakni selalu memberi contoh yang baik terhadap bawahan saya, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi sebelum bertindak kemudian menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan”.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721)780887

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA DI PEKON
PAMPANGAN KEPADA TOKOH ADAT DAN TOKOH
KEPEMUDAAN**

1. Identitas Informan

Nama : Roziqul Qorib, dan Tamzizi
Umur : 50 Tahun, dan 27 Tahun
Jabatan : Tokoh Adat Dan Tokoh Kepemudaan
Alamat : Pekon Pampangan, Kecamatan Cukuh
 Balak Kabupaten Tanggamus

2. Hasil Wawancara

Peneliti: Apakah BHP melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah?

Roziqul Qorib: *“Kehadiran BHP memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat Pekon Pampangan dalam hal demokrasi. Walaupun terjadi perbedaan pandangan pada waktu-waktu lalu tentang persoalan dalam sebuah pembangunan, juga intervensi dari kepala pekon cukup kuat pada waktu lalu namun kehadiran BHP cukup memberikan warna yang positif bagi masyarakat. Hal ini diakui karena saluran aspirasi masyarakat sudah sangat terbuka sehingga kalau ada tuntutan dari masyarakat tentang kepentingan pembangunan di pekon kami percayakan pada wakil kami yaitu BHP”.*

Peneliti: Apakah BHP melakukan pembahasan atas hasil aspirasi masyarakat?

Roziqul Qorib: *“Mengenai pembahasan yang dilakukan oleh BHP terhadap hasil aspirasi masyarakat kami tidak begitu mengetahui apa yang mereka lakukan, namun sejauh ini kami lihat pelaksanaan kegiatan pembangunan di pekon berjalan dengan lancar.”*

Peneliti: Apakah BHP mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Roziqul Qorib: *“Sejauh yang kita ketahui, pendanaan operasional BHP mungkin dari dana-dana desa bahkan ada dana-dana tersendiri dari pekon untuk BHP, saya juga kurang mengetahui hal itu secara jelas”*

Peneliti: Dalam menjalankan tugas dan fungsi BHP apa saja sarana dan prasarana yang di gunakan?

Roziqul Qorib: *“Aspirasi dari kami sebagai masyarakat terkadang tersalurkan melalui rapat atau musyawarah yang diadakan di balai pekon”*

Peneliti: Apakah ada tunjangan yang di dapat BHP dalam menjalankan tugasnya?

Roziqul Qorib: *“Mengenai pembiayaan dan tunjangan ini kami sebagai masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa dan dari mana tunjangan BHP itu didapat, mungkin dari APB Desa atau sumber dana lainnya”*

Peneliti: Apakah ada program kerja yang jelas yang dijalankan oleh BHP?

Roziqul Qorib: *“Seperti yang terlihat pembangunan yang dilakukan waktu itu seperti renovasi gedung posyandu, kami rasa itu salah satu dari program kerja BHP yang terlihat”*

Peneliti: Bagaimana cara BHP dalam menggambarkan seluruh kegiatan kerja?

Roziqul Qorib: *“Untuk menggambarkan seluruh kegiatan tentunya dilakukan di forum musyawarah yaitu musrenbang,*

kemudian nanti diadakan seleksi dari tiap-tiap aspirasi masyarakat”

Peneliti: Apakah BHP ikut serta dalam menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah pekon?

Roziqul Qorib: *“Dalam pelaksanaannya saya tidak mengetahui secara jelas, akan tetapi menurut saya meminta dan menyampaikan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintah itu seharusnya disampaikan untuk berjalannya pemerintah sebagaimana mestinya”*

Peneliti: Apakah BHP ikut memberikan usul dalam kegiatan rapat?

Roziqul Qorib: *“Menyampaikan usul dan pendapat jelas dilakukan karena disana wadah yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Menurut saya BHP sering mengajukan usul dan pendapat”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan dalam rapat evaluasi?

Roziqul Qorib: *“Evaluasi menurut saya sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah pekon, jadi menurut saya kegiatan evaluasi itu harus di jalankan walaupun di pekon ini ada ataupun tidak”*

Peneliti: Apa tujuan atau manfaat pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Pekon maupun yang diusulkan oleh BHP akan dibahas secara bersama?

Roziqul Qorib: *“Tujuan dari program pemerintah pekon menurut saya untuk kemaslahatan masyarakat di pekon ini dan manfaatnya mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan sarana atau pra sarana yang telah disediakan pemerintah pekon dan aparatnya, terpulang sarana atau prasarana itu masih layak atau tidak”*

Peneliti: Apakah masyarakat diikutsertakan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan?

Tamzizi: *“Terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan unsur masyarakat pasti diikut sertakan, tapi sebenarnya masyarakat sudah malas untuk menyampaikan aspirasi, karena kami menganggap bahwa musyawarah itu hanya sebuah formalitas adapun semua keputusan ada pada tangan kepala pekon, walaupun tidak semua karna BHP juga dalam hal ini bersifat tegas yaitu dengan cara melakukan kritik terhadap kebijakan dari kepala pekon, BHP juga berusaha mendorong masyarakat berpartisipasi dalam hal ini.*”

Peneliti: Bagaimana kesatuan tindakan BHP dengan Kepala Pekon dalam mewujudkan perealisasi pembangunan pekon ?

Roziqul Qorib: *“Biasanya memang BHP dating untuk menyampaikan aspirasinya dari masyarakat, lalu saya akan menyampaikannya kepada BHP untuk mengadakan musyawarah bersama masyarakat sehingga masyarakat bisa langsung berdiskusi di forum tersebut.”*

Peneliti: Bagaimana komunikasi BHP dengan Kepala Pekon dalam mewujudkan perealisasi pembangunan pekon?

Roziqul Qorib: *“Untuk komunikasi kerja antara BHP dan Kepala Pekon itu sebenarnya sudah baik, karena selama ini tidak pernah ada perselisihan antara BHP dan Kepala Pekon, hanya saja BHP kurang proaktif dalam menjalankan tugasnya, lebih banyak ikut sama Kepala Pekon”*

LAMPIRAN



Gambar 1.1
Kantor kepala pekon pekon pampangan



Gambar 1.2
Wawancara Dengan Bapak Kepala Pekon Pampangan



Gambar 1.3
Wawancara Dengan Ketua Badan Hippun Pemekonan



Gambar 1.4
Wawancara Dengan Tokoh Adat Pekon Pampangan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukrame I Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B/163 / UN.16 / DU.1 / PP.009.7/05/2022 23 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth
Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)
Pekon Pampangan.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Mirzi Pahlavi / 1831040224
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Kinerja Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon.

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Pada Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Pampangan.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tembusan :

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Sutanto, Sekeloa Timur Lampung 35131
Telp. 0721 780882, 74571 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7059/Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**KINERJA BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PEKON
(Studi di Pekon pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MIRZI PAHLOVI	1831040224	FUSA/ PPI

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan di Fakultas/Jurusan dengan tingkat kemiripan sebesar 2% dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 Februari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



a

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

1%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

1%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uir.ac.id <1%
Internet Source

2 repository.radenintan.ac.id <1%
Internet Source

3 Submitted to UIN Raden Intan Lampung <1%
Student Paper

4 Submitted to Tabor College <1%
Student Paper

5 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1%
Student Paper

6 Restu Pauzia. "PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER", Musawa: Journal for Gender Studies, 2021 <1%
Publication

7 etd.iain-padangsidempuan.ac.id <1%
Internet Source

8 repository.uinsaizu.ac.id <1%
Internet Source
